

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka peneliti membentuk kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan ambang batas parlemen pada pemilu tahun 2019 sejauh ini naik 0,5 % pada pemilu 2014 lalu menjadi 4% dan hal ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian sebagai bentuk terciptanya stabilitas pemerintahan di Indonesia yang berkualitas dari setiap partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum calon legislatif. Ambang batas pembentukan fraksi merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka penyederhanaan partai politik dari pada *Parliamentary Threshold* karena dengan ambang batas pembentukan fraksi tidak ada suara yang hilang dan *Fractional Threshold* tidak menyingkirkan caleg (Calon Legislatif) yang lolos dalam Bilangan Pembagi Pemilih untuk menjadi wakil di parlemen.

2. Keterlibatan terhadap penerapan ambang batas atau *Parliamentary Threshold* berkaitan pada peningkatan tingkat disproportionalitas di dalam sistem perwakilan. Hal ini terjadi karena pada dasarnya, ketika aturan dipertimbangkan banyak suara yang terbuang atau tidak terhitung ketika pemilu berlangsung, Konsep *Parliamentary Threshold* merupakan persentase perolehan suara untuk bisa memperoleh suara di kursi parlemen pada pemilu yang bersangkutan. Partai bisa selalu menjadi kontestan pemilu tapi jika tidak melampaui *Parliamentary Threshold* otomatis tidak memperoleh kursi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran peneliti dari permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DPR dan Pemerintah perlu untuk mengkaji ulang terkait besaran ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) yang ideal untuk mewujudkan sistem multipartai yang sederhana. Salah satunya dengan cara meningkatkan besaran

angka ambang batas parlemen melalui penyederhanaan fraksi-fraksi partai politik.

2. Ambang batas parlemen di Indonesia dapat dijadikan alat untuk menguatkan sistem parlemen di Indonesia, dimana apabila angka ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) tinggi, maka akan terwujud sistem multipartai sederhana yang akan berdampak positif bagi agenda penguatan sistem pemerintahan di Indonesia.